

**POHON KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
2025-2029**

VISI
PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN

Misi 1
Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(Indeks Pengelolaan keuangan daerah (IPKD))

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah

Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

1. Nilai AKIP perangkat Daerah
2. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

Tata Kelola Anggaran

Meningkatnya kualitas perencanaan dengan penganggaran daerah

Kualitas Dokumen Perencanaan dan penganggaran daerah

Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan dan Penganggaran

Jumlah SDM Perencanaan dan Penganggaran

Tata Kelola Perbendaharaan

Meningkatnya kualitas Penatausahaan belanja daerah

kualitas Penatausahaan belanja daerah

Meningkatnya Kualitas SDM penatausahaan

Jumlah SDM Penatausahaan

Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan

Meningkatnya kualitas pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah

kualitas pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah

Peningkatan Kualitas SDM Penyusun Laporan keuangan OPD

Jumlah SDM Penyusun Laporan Keuangan OPD

Tata Kelola Aset Daerah

Meningkatnya Pengelolaan BMD yang baik

Pengelolaan BMD Perangkat Daerah yang baik

Optimalisasi Pengamanan Barang Milik Daerah

Pengamanan BMD yang telah diamankan secara hukum dan administrasi

kualitas pengawasan dan pelaporan

Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan Pendapatan daerah

kualitas manajemen pengelolaan Pendapatan daerah

Meningkatnya retribusi daerah

Optimalisasi peningkatan Retribusi daerah

penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital

Meningkatnya penerapan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Sistem pengelolaan pendapatan daerah yang terintegrasi

upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan

Meningkatnya Pajak Daerah

1. peningkatan efisiensi pemungutan Pajak daerah
2. Jumlah SDM bidang

Meningkatnya Kualitas Data Pajak Daerah

Kualitas Data Pajak Daerah

Tata Kelola Organisasi

Meningkatnya Kualitas Layanan umum perangkat daerah

Kualitas Layanan umum perangkat daerah

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, Keuangan dan

kualitas dokumen perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BPKPAD

Crosscutting dengan seluruh OPD

Crosscutting dengan seluruh OPD

Crosscutting dengan seluruh OPD

Crosscutting dengan seluruh OPD

Crosscutting dengan seluruh OPD Penghasil

Crosscutting dengan seluruh OPD Penghasil

Crosscutting dengan seluruh OPD Penghasil

Crosscutting dengan Setda, Inspektorat Daerah, Bappedalitbang, Kominfo

I. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
12. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembinaan
13. Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
3. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
4. Penatausahaan Pembayaan Daerah
5. Koordinasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
6. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PK)
8. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
9. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
10. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
11. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah
2. Analisis Investasi Pemerintah Daerah
3. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah
4. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
5. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah
6. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
7. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
8. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
9. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
10. Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota

Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

1. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
2. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
3. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

II. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
6. Penyusunan Tindakan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
7. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
8. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
9. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
10. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
11. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
12. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
13. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Penyusunan Standar Harga
2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
3. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
4. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah
6. Inventarisasi Barang Milik Daerah
7. Pengamanan Barang Milik Daerah
8. Penilaian Barang Milik Daerah
9. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
10. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
11. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
12. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
13. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

III. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Pajak Daerah
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5. Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah
9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
11. Penagihan Pajak Daerah
12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

IV. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan/Trivulanan/ Semesteran SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/ Semesteran SKPD
8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
3. Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
7. Pemindahan Tugas ASN
8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
9. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
10. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyediaan Bahan/Material
8. Fasilitas Kunjungan Tamu
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Penatausahaan Ansim Dinamis pada SKPD
11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pengadaan Alat Besar
4. Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor
5. Pengadaan Mebel
6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya P
7. engadaan Aset Tetap Lainnya
8. Pengadaan Aset Tak Berwujud
9. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkut Darat Tak Bermotor
5. Pemeliharaan Mebel
6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
8. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN



(NAMA, I, SE, MM)
19.00.08.200212 1 003